

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI KABUPATEN KEPULAUAN

Oleh: Fitra Nurmizian

fitranurmizian0103@yahoo.com

Pembimbing: T. Romi Marnelly, M.Si

Jurusan Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru 28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya dikantor anggota legislatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui hal-hal yang mendorong dan penghambatan bagi keikutsertaan perempuan didalam partai politik dan legislatif serta kontribusi sebagai anggota partai dan legislatif juga upaya mereka didalam mewujudkan kesetaraan gender. Penelitian ini diberi judul ***“Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Meranti”***. Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana perempuan bisa memilih berpartisipasi dalam politik dengan berbagai hambatan yang terjadi serta melakukan kontribusi dan mewujudkan kesetaraan gender. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive. Jumlah sampel yaitu 5 orang. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif Deskriptif dengan analisa data Kualitatif. Instrumen penyaringan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: perempuan yang berpartisipasi dalam politik umumnya pertama kali didorong oleh suami mereka dan setelah mengenal politik lebih dalam muncul dorongan dalam diri mereka untuk melakukan lebih untuk masyarakat dan juga karena keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik sangat sedikit. Hambatan yang terjadi saat mereka ikutserta dalam kegiatan politik antara lain dari budaya, lingkungan, dan pendidikan. Selama menjadi anggota partai dan legislatif mereka menjalankan tugas mereka dengan baik serta melakukan upaya antara lain kebebasan berpendapat, bertahan dalam politik, sosialisasi politik dan membentuk organisasi khusus perempuan agar kedudukan perempuan dan laki-laki didalam partisipasi politik sama.

Kata kunci : Partisipasi politik, Perempuan, Kesetaraan Gender

WOMEN POLITICAL PARTISICIPATION AT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

By: Fitra Nurmizian

fitranurmizian0103@yahoo.com

Consellor: T Romi Marnelly, M.Si

*Departement Of Social Science and Politics Riau University
Kampus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293 Telp / Faxes. 0761 - 63277*

ABSTRACT

*This research was conducted at the Kabupaten Kepulauan Meranti, exactly at the office DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti . This study aims to determine the things that encourage and inhibit the participation of women in political parties and legislative as well as the contribution of party and legislative members as well as their efforts in realizing gender equality. This study is titled **“Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Meranti”**. The main issue of this study is how women can choose to participate in politics with the various barriers that occur and make contributions and realize gender equality. Sampling in this research is by purposive sampling. samples is 5 people. The method used is Kualitatif Descriptive method with Kualitatif data analysis. The data filtering instruments used are observation, interview and documentation. The results of this study indicate: women who participated in politics were generally first encouraged by their husbands and after getting to know the politics deeper there was an incentive in them to do more for the community and also because women's representation in political participation was very small. Barriers that occur when they participate in political activities include from culture, environment, and education. As long as they are members of the party and the legislature they perform their duties well and make efforts such as freedom of expression, persistence in politics, political sausageization and forming a special women organization so that the position of women and men in the same political participation.*

Key Word: Political participation, Women, Gender Equality

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki banyak Pulau, Suku, Bahasa dan Budaya, negara yang bersifat multikultural ini merupakan salah satu negara berkembang yang menganut sistem Demokrasi Pancasila dan kepala negara adalah Presiden. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi mereka juga ikutserta dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan negara seperti dibidang politik.

Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *politeia* yang berarti kebijaksanaan. Politik dipahami sebagai kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict dan conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decisious making*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). (Damsar, 2010:10)

Partisipasi dimengerti sebagai berperan serta dan ikut serta, yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan publik, baik yang memiliki dimensi politik maupun nonpolitik, dapat terselenggara dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan warga. (Damsar, 2010:177)

Kehidupan politik meliputi berbagai aspek seperti anggota partai politik, aktivis, anggota organisasi, ikut serta pada pemilihan, mencari jabatan, ikut dalam demo, menduduki jabatan dan aktivis.

“Sosiologi memandang wanita sebagai suatu objek studi banyak diabaikan hanya di bidang perkawinan

dan keluarga ia dilihat keberadaannya. Kedudukannya dalam sosiologi, dengan kata lain, bersifat tradisional sebagaimana ditugaskan kepadanya oleh masyarakat yang lebih besar: tempat kaum wanita adalah di rumah” (Ehrich, 1971:421). (Jane C. Ollenburger, Helen A. Moore, 1996:1).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat masuk kedalam partai politik sering kali menjadi permasalahan bagi kaum perempuan, mulai dari waktu untuk berbagai kegiatan di partai, waktu untuk mengadakan rapat maupun pertemuan yang tidak dapat ditentukan baik siang maupun malam, hal ini dilakukan sebagai upaya bagi mereka untuk mencari suara agar bisa menduduki kursi legislatif.

Hambatan lain bagi perempuan antara lain:

- Hambatan fisik perempuan: katanya dibebani tugas “kodrat untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Keharusan ini mengurangi keluasaan mereka untuk aktif terus menerus dalam berbagai bidang kehidupan.
- Hambatan teologis: untuk waktu yang lama perempuan dipandang sebagai makhluk yang diciptakan untuk lelaki, termasuk untuk mendampingi mereka, menghibur dan mengurus keperluannya.
- Hambatan sosial budaya: pandangan ini melihat perempuan sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, tergantung, dan menerima keadaan sebaliknya lelaki dinilai sebagai makhluk yang

aktif, kuat, cerdas, mandiri, dan sebagainya.

- Hambatan historis: kurangnya nama perempuan dalam sejarah dimasa lalu bisa dipakai membenarkan ketidakmampuan perempuan untuk berkiprah seperti halnya lelaki. (Mely G. Tan, 1996:16)

Keterwakilan perempuan didalam partai politik maupun lembaga legislatif tentunya merupakan hal yang penting karena mengingat bahwa Kabupaten ini masih baru dan tidak banyak perempuan yang tertarik untuk berpartisipasi, kemudian perempuan yang sudah menjadi anggota legislatif tentunya akan memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini selalu dikuasai oleh laki-laki, dengan terlibatnya perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif maka perempuan-perempuan tersebut mampu untuk mewujudkan kesetaraan gender, yang mana selama ini perempuan kurang leluasa dalam menyampaikan keluhan-keluhan yang mereka rasakan dan tak bisa bergerak bebas.

dari 30 kursi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada pemilihan umum tahun 2014 lalu terdapat 5 orang perempuan yang terpilih dan menduduki kursi anggota legislatif, dengan jumlah minoritas didalam lembaga legislatif ini mereka tentunya memiliki peran untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Berdasarkan fenomena yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Politik**

Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Meranti”

Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan-kaitan erat antara masalah dengan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Maka dari itu rumusan masalah dari penelitian adalah:

1. Apa faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat bagi perempuan dalam keterlibatannya sebagai anggota partai politik?
2. Apa yang sudah dilakukan perempuan dalam keterlibatannya sebagai anggota partai politik dan legislatif di Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Bagaimana upaya perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender setelah mereka berpartisipasi dalam partai politik dan legislatif?

Tujuan dari Penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apa faktor yang menjadi pendorong dan penghambat bagi perempuan dalam keterlibatannya sebagai anggota partai dan legislatif
2. Untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan perempuan dalam keterlibatannya sebagai anggota partai politik dan legislatif di Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Untuk mengetahui upaya perempuan mewujudkan

kesetaraan gender setelah mereka berpartisipasi dalam partai politik dan legislatif.

Manfaat Penelitian ini:

1. Menjadikan bahan kajian pengembangan ilmu khususnya dalam bidang sosiologi serta dimanfaatkan untuk wawasan peneliti tentang partisipasi politik perempuan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan baik bagi mahasiswa dan juga masyarakat umum.
3. Untuk menambah kajian dibagian sosiologi gender dan politik.

TINJAUAN PUSTAKA

Feminisme Liberal

Eksprei pertama dari teori ketimpangan gender adalah feminisme liberal, yang berargumen bahwa perempuan bisa mengklaim kesamaan dengan lelaki atas dasar kapasitas esensial manusia sebagai agen moral yang bernalar, bahwa ketimpangan gender adalah akibat dari pola seksis dan patriarkis dari divisi kerja, dan bahwa kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengubah divisi kerja melalui pemolaan ulang institusi-institusi kunci hukum, pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan media.

Karena itu feminis liberal berdasarkan pada keyakinan bahwa:

1. Semua manusia mempunyai ciri esensial tertentu, kapasitas sebagai agen moral dan nalar dan aktualisasi diri.
2. Pelaksanaan kapasitas ini dapat dijamin melalui pengakuan legal atas hak-hak universal.

3. Ketimpangan antara lelaki dan perempuan adalah diciptakan secara sosial (*social constructed*), dan tidak ada dasarnya dalam "alam".
4. Perubahan sosial untuk kesetaraan dapat dicapai dengan mengajak publik yang rasional dan dengan menggunakan Negara. (George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2004:420).

Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Teori pilihan rasional tak menghiraukan apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

Definisi Konsep

Konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena yang sama, namun demikian kenyataan konsep yang mempunyai tingkat generalisasi berbeda oleh karena semakin rendah konsep itu diukur, untuk menghindari salah pengertian tentang konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian mengoperasikan konsep – konsep sebagai berikut :

1. Partisipasi politik yang dimaksud disini ialah ikutserta secara aktif dalam setiap kegiatan politik dan memberikan pemikiran untuk

mewujudkan kesetaraan gender dengan melakukan semua kegiatan yang telah ditetapkan partai dan lembaga legislatif.

2. Perempuan yang dimaksud disini adalah perempuan yang telah ikut dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik dan terpilih menjadi legislatif.
3. Kabupaten Kepulauan Meranti yang dimaksud disini ialah kabupaten yang baru mekar sehingga jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam politik masih sedikit.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti, kabupaten yang ini merupakan kabupaten yang berusia 8 tahun.

Subjek Penelitian

Subjek didalam penelitian ini adalah 5 orang anggota legislatif di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan menggunakan teknik pengambilan data secara purposive sampling (Sugiyono, 2002:62) yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan , penarikan sampel dilakukan dengan sengaja dan bertujuan yang memiliki ciri-ciri khusus yaitu yang dijadikan sampel adalah para perempuan yang saat ini aktif sebagai anggota partai politik dan anggota legislatif.

Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah sumber data yang memberikan informasi

langsung kepada pengumpul data dijelaskan oleh Sugiyono (2007:62) data yang diperoleh dan dikumpulkan dari response yang berguna menjawab permasalahan yang ada, data primer adalah yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2007:63) adalah data yang tidak bisa memberi informasi langsung kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah yang tidak bisa memberi informasi langsung kepada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain, dan sebagainya. Didapat dari sumber data guna mendukung informasi yang diperoleh dari lapangan. Sumber data sekunder juga diperoleh dari buku-buku perpustakaan, internet, skripsi, jurnal, juga referensi lain yang terkait dengan peran perempuan dalam partisipasi politik di Kabupaten Kepulauan Meranti. (Andi Prastowo, 2016:211)

Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data yang valid, akurat, lengkap, maka menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Observasi

Sutrisno Hadi (1987:136) menerangkan bahwa pengamatan (observasi) merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak

pada objek penelitian. (Andi Prastowo, 2016:220)

Observasi pada penelitian ini dilakukan pada saat peneliti melakukan pengamatan langsung seperti melihat kegiatan dan aktivitas ibu-ibu dewan.

Wawancara

Sugiyono (2007:72) menjelaskan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. (Andi Prastowo, 2016:212)

Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara menyalin data-data atau arsip-arsip yang tersedia saat interview atau berhubungan dengan peneliti. Dalam hal ini data yang diperlukan seperti jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam politik baik partai maupun sebagai anggota legislatif, bagan atau struktur jabatan dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Individu tidak diisolasi atau diorganisasikan ke variabel atau hipotesis, namun dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. (Andi Prastowo, 2016:22), Penelitian kualitatif ini yaitu peneliti

menceritakan fakta penelitian bagaimana awal para informan merambah dunia politik, dengan rinci, yaitu dengan penjelasan secara lisan oleh informan, seperti hasil data yang ditemui dilapangan contohnya dari hasil wawancara tentang apa yang sudah dilakukan perempuan pada keterlibatannya dalam partisipasi politik dan bagaimana perempuan-perempuan tersebut mewujudkan kesetaraan gender.

GAMBARAN UMUM PARTISIPASI POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Kabupaten Kepulauan Meranti terletak pada abagian Pesisir Timur Pulau Sumatera pada koordinat 01°39'33"- 01°25'08" LU dan 102°10'29"- 103°16'43" BT. Posisi ini sangat strategis, yaitu pada jalur pelayaran Internasional tersibuk di dunia di Selat Melaka, berbatasan langsung dengan Malaysia. Berada pada dua segitiga pertumbuhan ekonomi yaitu Indonesia - Malaysia - Singapura (IMS-GT) dan segitiga pertumbuhan Indonesia - Malaysia - dan Thailand (IMS-GT). Luas seluruh

wilayah Kabupaten adalah 682.285 Ha dengan wilayah darat \pm 359.806 Ha dan wilayah laut \pm 359.806 Ha, terdiri dari 9 Kecamatan dan 101 desa/kelurahan. Terdiri atas 4 pulau utama yaitu Pulau Merbau, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang dan Pulau Padang.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali dihembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya daerah di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan yang gigih dari sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang persetujuan terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 perihal dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang persetujuan pemerintahan Provinsi Riau terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang persetujuan Pemerintahan Provinsi Riau terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2014

Pemilihan umum yang dilakukan 2014 diikuti oleh berbagai kalangan di setiap lapisan masyarakat baik sebagai pemilih di TPS maupun yang menjadi salah satu calon anggota legislatif pada 2014. Keikutsertaan setiap masyarakat merupakan sebuah kewajiban karena setiap keputusan yang mereka ambil dan partisipasi mereka di dalam politik merupakan salah satu cara untuk menuju ke masa depan yang lebih baik, masyarakat dituntut untuk selalu memakai hak pilih mereka dalam setiap pemilihan disebabkan mereka harus memilih dengan tepat apa yang mereka inginkan dan siapa yang mereka percayai untuk menduduki jabatan tertentu agar kehidupan mereka lebih sejahtera. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki beberapa daerah pemilihan, antara lain dapil I meliputi

Tebing Tinggi, dapil II Tebing Tinggi Timur, dapil III Kecamatan Rangsang Barat, Rangsang Pesisir dan Tebing Tinggi Barat, dapil IV Kecamatan Merbau, Pulau Merbau dan Tasik Putri Puyu.

Struktur Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti 2014-2019

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sebuah komisi merupakan unit kerja utama yang membidangi masalah-masalah tertentu. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi.

Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan), meliputi:

1. Bagian hukum, sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Tata Pemerintahan
3. Kesbang, politik, dan perlindungan masyarakat
4. Bagian urusan kepegawaian, sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
5. Sosial politik
6. Kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pertahanan
8. Sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi
9. Lingkungan hidup
10. Inspektorat
11. Kecamatan
12. Bagian umum dan perlengkapan, sekretariat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
13. Pemberdayaan masyarakat desa

Komisi B (Bidang Ekonomi dan Pembangunan), meliputi:

1. Pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan
2. Badan perencanaan pembangunan daerah
3. Pekerjaan umum dan perhubungan
4. Dinas pendapatan daerah
5. Bagian keuangan, sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
6. Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan mikro perbankan

Komisi C (Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia)

1. Pendidikan, pemuda, dan olahraga
2. Bagian kesejahteraan rakyat, sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Dinas kesehatan
4. RSUD
5. PMD
6. Pasar, pertamanan dan kebersihan balitbang

Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti 2014-2019

A. Badan Legislasi Daerah

Tugas Badan Legislasi terdiri dari:

1. Merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan rancangan Peraturan Daerah untuk satu masa keanggotaan DPRD dan setiap tahun anggaran.

B. Badan Anggaran

Badan anggaran mempunyai tugas:

1. Memberikan saran dan pendapat kepada daerah dalam penyusunan arah kebijakan umum RAPBD

C. Badan Kehormatan

Badan kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. Tata cara pembentukan, penerapan jumlah anggota, tugas, wewenang, hak dan kewajiban badan kehormatan DPRD ditetapkan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Identitas informan yang diambil oleh peneliti adalah perempuan yang telah terpilih sebagai anggota legislatif tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian informan diambil sejumlah 5 orang yang merupakan keseluruhan perempuan yang menjadi anggota legislatif. Untuk mengetahui lebih jelas Identitas Informan dapat dilihat sebagai berikut.

Mundarseh

Perempuan berdarah Jawa ini lahir di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, lahir pada 15 Agustus 1980 dan saat ini berusia 37 tahun dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Dorak RT/RW 03/01 Selatpanjang. Pendidikan terakhir beliau adalah SMA sederajat tepatnya SMA 02 Selatpanjang, pekerjaan bu Mundarseh sebelum menjadi anggota dewan adalah sebagai ibu rumah tangga biasa.

Suami dari bu Mundarseh adalah bapak Zulfikar, berprofesi sebagai wiraswasta dengan pendapatan perbulan sebesar 15 juta rupiah, dari pernikahannya dengan bapak Zulfikar mereka dikarunia 3 orang anak diantaranya Fitriani Rossa Safira, Merisa Dwi Rossiyani dan Afiqa Alifa Qhoirunnisa. Mulai aktif pada tahun 2004 kemudian mencalonkan diri pertama kali juga pada tahun 2004, partai yang menjadi perahu induk mundarseh pada tahun 2004 yaitu Partai Amanat Nasional dan kemudian pada tahun 2009 pindah ke Partai Demokrat. Jabatan didalam partai politik sebagai anggota partai tetapi sebelum masuk ke partai politik bu mundarseh dulunya juga aktif dalam organisasi saat masih duduk di bangku sekolah seperti OSIS. Jabatan didalam Lembaga Legislatif saat ini sebagai sekertaris komisi c.

Dorongan Perempuan Dalam Partisipasi Politik

Dorongan keikutsertaan ibu Mundarseh dalam politik:

“Sebetulnya saya kenal politik dari suami, yang memotivasi saya untuk masuk ke partai juga suami, saya tidak ada minat kesitu, karena suami mensupport jadi luar biasa saya rasa sampai akhirnya saya bisa duduk disini. Saya sendiri basicnya bukan orang politik, tidak pernah ikut organisasi politik, demo, atau kegiatan yang berbau politik lah, tapi karena suami yang memberi saya masukan dan support ke saya Alhamdulillah saya mulai berani masuk ke partai politik tahun 2004 lalu. Selain dukungan suami

tentunya saya punya tujuan sendiri setelah masuk sebagai anggota partai politik, saya mau mengangkat derajat perempuan terus mau ngajak perempuan diluar sana untuk lebih aktif dalam bidang politik” (wawancara pada 10 april 2017).

Hambatan Perempuan Dalam Partisipasi Politik

Budaya

Hambatan yang terjadi pada ibu Yekti Handayani, SP dari sisi budaya sebagai anggota partai:

“Sebenarnya background keluarga saya bukan dipolitik mbak, keluarga saya itu kebanyakan lebih ke usaha mbak, jadi pas saya kemaren mencalon mbak-mbak saya yang dijawab pada wanti-wanti mbak soalnya mereka pada takut saya nanti nga bisa mimpin mbak, mereka pada bilang ke saya perempuan itu dari dulu kerjanya tu ibu rumah tangga mbak kalau politik itu kerjanya laki-laki” (wawancara dilakukan 17 april 2017).

Lingkungan

Hambatan yang dirasakan ibu Mundarseh dari lingkungan sebagai anggota partai:

“Hambatan yang saya alami saat mencalon lebih ke lingkungan, kadang orang sekitar yang kita kenal tak selamanya mendukung, entah itu mungkin karna mereka menganggap saya remeh atau

tak cocok ikut partai atau jadi calon legislatif karna tak nampak seperti seorang pemimpin” (wawancara pada 10 april 2017).

Informan merasa bahwa lingkungan sekitar tidak selalu sesuai dengan apa yang dibayangkan, orang yang kita kenal baik tetangga atau teman dekat tidak selalu mendukung. Dalam partisipasi politik informan merasa ada tekanan dari lingkungan sekitarnya yang menganggap informan tidak cocok dalam bidang politik, adanya pandangan terhadap informan dari orang yang ia kenal bahwa mereka menganggap informan lemah dan tidak mampu menjadi pemimpin.

Pendidikan

Hambatan dari bidang pendidikan yang dirasakan ibu Mundarseh selama ikut dalam partai dan anggota legislatif:

“Dari pendidikan sedikit banyak ada, sebab kita tau pendidikan itu penting untuk menambah ilmu kita, sedikit banyak juga berpengaruh dalam berpolitik, sebab kalau pendidikan kita sedang-sedang saja orang menganggap kita tak terlalu pandai, jadi karna saya tamat SMA sekarang saya sambung kuliah di universitas swasta dekat pekanbaru” (wawancara pada 10 april 2017).

Kontribusi Perempuan Pada Partisipasi Politik

Sebagai Anggota Partai Politik

Yang sudah dilakukan oleh ibu Mundarseh sebagai anggota partai:

“Pemikiran yang saya sumbangkan seperti cara supaya mendapatkan suara yang banyak bagi anggota perempuan dalam pemilihan nanti, kemudian sosialisasi ke masyarakat supaya nanti pilih saya. Saya coba lebih sering turun kelapangan untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat, sekalian saya juga beberapa kali beri bantuan untuk anak yatim disana” (wawancara pada 10 april 2017).

Sebagai Anggota Legislatif

Yang sudah dilakukan ibu Mundarseh sebagai anggota legislatif:

“Tentunya sudah jadi anggota dewan saya dan teman-teman banyak sudah berbuat untuk masyarakat melalui reses, juga sejauh ini saya melakukan hearing 3 bulan sekali, dan dari hasil hearing banyak masyarakat yang meminta bantuan untuk daerah mereka, seperti masalah pembangunan jalan yang rusak agar cepat diperbaiki dan banyak lagi, saat saya menjadi anggota legislatif yang saya lakukan itu seperti membangun sekolah di gayung kiri, bantuan untuk para petani, entah berbentuk pupuk atau bibit, juga alat-alat untuk bertani, ini saya lakukan di daerah rangsang, tanjung samak” (wawancara pada 10 april 2017).

Pernyataan sekertaris dewan bapak Drs. Nuriman Khair sebagai key informan terhadap perempuan selama terlibat didalam partisipasi politik:

“Sejauh ini tidak ada gangguan yang saya lihat selama perempuan menjabat sebagai anggota legislatif, kalau keterlambatan untuk datang kekantor sedikit banyak pernah terjadi mungkin karena pengelolaan waktu antara kerja sama keluarga terbagi, tapi setiap ketidakhadiran atau lambat masuk kekantor mereka selalu mengabari terlebih dahulu. Saya pribadi melihat tidak ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan ya sebab kalau sudah masuk dilembaga legislatif ini, tugas mereka semua sama tapi awal-awal masuk di dewan ini mereka agak kaku, seperti tertekan karena jumlah laki-laki banyak dari pada mereka tapi sekarang malahan perempuan lebih agresif, aktif dari pada laki-laki dalam bamus, rapat paripurna, rapat fraksi, dan mereka juga mudah berbaur sekarang dengan laki-laki. Untuk penghargaan atas kerja mereka belum ada, ya mereka bekerja sewajarnya saja. Perempuan sangat diperlukan, apa lagi mereka punya sesuatu atau kemampuan berkomunikasi yang baik, otomatis bisa cepat berinteraksi dengan yang lain, sosok perempuan sangat berada dalam lembaga ini sebab dengan adanya sosok perempuan para ibu-ibu diluar sana bisa bebas memberi pendapat, bercerita dengan wakil rakyat karena saya rasa kalau ibu-ibu pasti nyaman curhat sama ibu-ibu

juga kan” (wawancara pada tanggal 19 april 2017).

Upaya Perempuan Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Partisipasi Politik

kesetaraan gender adalah kesamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, kesetaraan gender muncul karena adanya rasa ketidakadilan bagi perempuan terhadap penilaian oleh kelompok masyarakat yang besar bahwa posisi perempuan berada dibawah laki-laki, mengingat tidak adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki dan mereka diberikan hak yang sama membuat R.A Kartini mengawali gerakan emansipasi wanita yang mana kaum perempuan mendapatkan persamaan hak dengan kaum laki-laki dan seorang perempuan tidak lagi membatasi peran mereka didalam dapur saja.

Kebebasan Berpendapat

Kutipan wawancara ibu mundarseh:

“Walaupun mayoritas laki-laki Alhamdulillah selama ini saya lebih berani dalam berbicara apalagi tentang pekerjaan dan tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat, kalau kita tidak berani berbicara memberi masukan dan sebagainya maka perempuan yang jumlahnya minoritas ini makin dianggap lemah, jumlah tu tidak jadi halangan buat saya berani mengemukakan hal-hal apa yang saya rasa harus” (wawancara pada 10 april 2017).

Bertahan Dalam Politik

Kutipan wawancara ibu Mundarseh:

“Politik itu kan mengarah pada kedudukan atau pemimpin jadi untuk dapat kedudukan itu saya perlu dukungan dari masyarakat, cara agar masyarakat mendukung saya jelas dengan mendekati mereka, makanya saya sering komunikasi dengan masyarakat, ikut dalam kegiatan-kegiatan wirit yasin, arisan, jempuran acara ditempat mereka. Dengan gitu kan masyarakat lebih kenal sama saya” (wawancara pada 10 april 2017).

Sosialisasi politik kepada perempuan

Kutipan wawancara ibu Mundarseh:

“setiap kegiatan yang saya hadiri khususnya kegiatan arisan, PKK saya sering menyampaikan kalau perempuan sekarang wajib ikut dalam kegiatan politik mengingat kondisi perempuan selalu dinomor duakan. Terkadang untuk itu saya sering melakukan perjalanan ke dapil saya terus disitu biar orang tidak bosan saya beri hiburan orgen, bantuan sosial seperti sembako supaya ibu-ibu tertarik datang dan dengar sosialisasi politik yang saya berikan, saya kasi tahu ke masyarakat politik itu sebenarnya makin dalam kita alami makin enak, saya sering ajak mereka ikut dalam kegiatan politik” (wawancara pada 10 april 2017).

Berdasarkan hasil wawancara informan bahwa setiap kegiatan yang ia

Pembentukan Organisasi Khusus Perempuan

Organisasi perempuan merupakan sebuah wadah bagi perempuan untuk lebih aktif dalam kehidupan sosial mereka, organisasi yang diperuntukkan bagi perempuan mempunyai fungsi sebagai tempat memberdayakan perempuan dengan maksimal.

Kutipan wawancara ibu Hafizoh:

“saya pernah buat badan pemberdayaan perempuan supaya bisa menampung aspirasi semua perempuan yang ada di kabupaten kita ini, karena saya ingin melindungi dan menjadikan wanita lebih kuat dalam menjalani kehidupan mereka, kasus pemerkosaan, penganiayaan yang menjadi korban semuanya perempuan baik dewasa, remaja atau anak-anak” (wawancara pada tanggal 25 april 2017).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dalam penelitian mengenai peran perempuan dalam partisipasi politik di Kabupaten Kepulauan Meranti disimpulkan sebagai berikut:

Perempuan yang ikut didalam kegiatan politik awalnya didorong oleh suami untuk bergabung dengan partai politik, sebelum aktif di partai politik mereka

adalah seorang ibu rumah tangga, beberapa dari perempuan yang aktif dalam politik ini didorong oleh teman dan diri sendiri. Setelah terlibat dalam partai politik mereka mulai serius untuk mendalami setiap kegiatan politik dengan didorong keinginan diri sendiri agar bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat serta mengangkat derajat perempuan.

Saran

Untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus lebih banyak melakukan sosialisasi mengenai politik pada perempuan didesa-desa agar mereka tidak lagi berpikir bahwa tugas mereka hanya didalam rumah tangga juga keikutsertaan perempuan dalam politik bisa meningkat sehingga jumlah anggota legislatif perempuan ditahun-tahun akan datang bisa lebih banyak jumlahnya mengingat peran perempuan didalam lembaga legislatif sangat penting karena mewakili perempuan dalam jumlah besar.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Astiyanto, Heniy. 2006. *Filasafat jawa “menggali butiran-butiran kearifan lokal”*. Yogyakarta: Warta Pustaka Yogyakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cantor Dorothy, W. 1998. *Women In Power (Kiprah Wanita Dalam Dunia Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.

- Duverger, Maurice. 1982. *Sosiologi Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Fahmi, Khairul. 2012. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handoyo, Eko. 2013. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Kodir Faqihuddin, Abdul. 2004. *Bangga Menjadi Perempuan Perbincangan Dari Sisi Kodrat Dalam Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulia Musdah, Siti, Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Olenburger Jane, C., Helen A. Moore. 1996. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Philipus, Nurul Aini. 2004. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Rush, Michael, Phillip Althoff. 1971. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Anang. 2009. *Bahasa Perempuan "sebuah potret ideologi perjuangan"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sihiti, Romany. 2007. *Perempuan, Kesenjangan & Keadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tan, G Mely. 1996. *Perempuan Indonesia (Pemimpin Indonesia?)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

2. SKRIPSI

Marviana, Elky. "Kehidupan Keluarga Perempuan Kuli Angkong Kelapa Sawit di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar".